

# Pertemuan 12

## Pancasila sebagai Sistem Etika

### Mata Kuliah Pancasila

Pengertian sistem etika dan sistem etika Pancasila.  
Alasan diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika.  
Etika Politik Pancasila: sebuah etika terapan.



## Sistem Etika Politik Pancasila Sebuah Etika Terapan

Etika politik adalah etika yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan sebagainya



Sistem etika politik berdasarkan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia bukanlah negara teokrasi berbasis satu agama tapi juga bukan negara sekuler yang tidak membolehkan dilibatkannya nilai-nilai agama dalam wilayah publik. Kedaulatan pada hakikatnya berada di tangan Tuhan tetapi, dalam kehidupan bernegara tentulah Tuhan tidak turun langsung mengaturnya. Pengaturan itu didelegasikan kepada rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia adalah penyelenggara kedaulatan Tuhan. Legitimasi etis kekuasaan berdasarkan etika politik Pancasila adalah bersumber dari Tuhan yang didelegasikan kepada rakyat yang nanti akan memilih pemimpin negara.



Kemanusiaan yang adil dan beradab, politik di Indonesia harus dijalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat madani yang dilandaskan pada kebebasan dan supremasi hukum . Maknanya adalah kebebasan dalam berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat tidak dapat dibelenggu asalakan semua masih sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mematuhi adab di masyarakat.



Praktik politik Indonesia harus diarahkan pada semangat menjaga kebhinekaan dalam kerangka NKRI. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di mana diberikan wewenang untuk mengelola masalah-masalahnya sendiri berdasarkan desentralisasi serta melakukan penegakkan hukum terhadap praktik politik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.



Segala praktik penyelenggaraan negara harus dikembalikan kepada rakyat. Segala kebijakan serta keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berdasarkan atas hukum dan mewakili kepentingan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.



Segala penyelenggara negara harus diarahkan bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat dalam penegakkan hukum, kesejahteraan serta ekonomi dan pendidikan tentunya harus diwujudkan oleh penyelenggara negara baik dari pusat sampai daerah. Hal ini agar terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.



# Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika

*Pertama*, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.





*Kedua*, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (*good and bad*). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (*good*) dan buruk (*bad*). Archie Bahm dalam *Axiology of Science*, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bahm, "Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan" (Bahm, 1998: 58).



*Ketiga*, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai dengan pajak.



*Keempat*, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain.



*Kelima*, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, *global warming*, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat.

